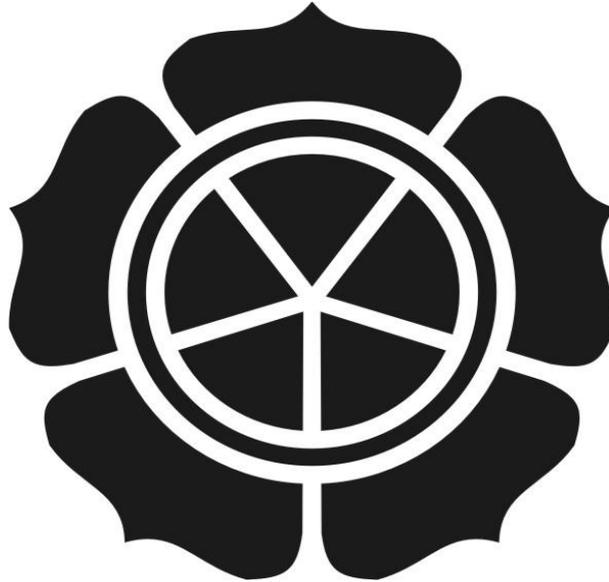


**PENGARUH PERGANTIAN REZIM PEMERINTAHAN  
TERHADAP PENGAMALAN PANCASILA  
MASYARAKAT INDONESIA**



**STMIK "AMIKOM" YOGYAKARTA**

**OLEH:**

**DAVID MAYSHIOGIE**

**11.11.5705**

**KELOMPOK F**

**PROGRAM STUDI STRATA 1**

**JURUSAN TEKNIK INFORMATIKA**

**2011**

## **ABSTRAK**

### **Pengaruh Pergantian Rezim Pemerintahan terhadap Pengamalan Pancasila Masyarakat Indonesia**

Pergantian rezim pemerintahan di Indonesia memiliki pengaruh yang sangat signifikan bagi masyarakatnya. Begitu pula dengan Pancasila sebagai dasar negara tidak terlepas dari campur tangan rezim yang berkuasa. Segala proses pemaknaan dasar negara dapat diatur secara penuh oleh rezim yang berkuasa secara mutlak, tergantung dengan kehendak rezim yang berkuasa itu.

Dalam makalah ini penulis mencoba untuk menuangkan pemikiran tentang begitu besarnya pengaruh pergantian rezim pemerintahan terhadap pengamalan Pancasila bagi masyarakat Indonesia. Penulis akan menjabarkan fakta-fakta historis dan aspek-aspek sosiologis yang mempengaruhi pengamalan Pancasila masyarakat Indonesia.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG.

Pancasila merupakan ideologi bangsa yang memiliki pemikiran *dual system*. Dual system disini berarti ideologi ini terbagi atas dua dasar pemikiran yang secara fundamental berbeda yaitu liberalisme dan sosialisme. Bangsa ini telah sedemikian lama mengetahui pancasila secara formil sebagai dasar negara. Namun bukanlah dipahami sebagai sebuah ideologi dan basis kepercayaan dari warga negara, kesulitannya adalah dimana begitu banyak diversitas kultural bangsa ini sehingga pancasila sangat sulit dijadikan arus utama ideologi (*pancasilais mainstream*). Terbukti selama 66 tahun Indonesia mengaku pada dunia bahwa bangsanya berideologikan Pancasila, namun pada kenyataannya masih banyak warga negara yang belum dapat mengerti Pancasila sebagai basis ideologi negara ini. Bahkan bermunculannya kelompok-kelompok radikal di Indonesia, yang berusaha untuk mengemukakan ideologi-ideologi alternatif untuk menggantikan Pancasila. Hal tersebut menjadi bukti bahwa warga negara sendiri pun belum tentu mengerti makna dari Pancasila.

Dalam hal ini penulis mencoba untuk melakukan tinjauan historis terhadap pemaknaan pengamalan Pancasila bagi masyarakat Indonesia. Dimana dalam fluktuatifnya keadaan politik di Indonesia dari awal berdirinya negara ini yang

mengaku berideologikan Pancasila, sampai pada bergantinya rezim pemerintahan yang secara fundamental berbeda secara kinerja dan basis ideologi.

Dengan ini penulis akan berupaya menjabarkan satu persatu fakta historis tentang pergantian rezim di Indonesia dan penulis berupaya untuk melihat hubungan antara pergantian rezim pemerintahan dengan imbasnya terhadap penerapan pengamalan Pancasila pada masyarakat Indonesia yang memiliki diversitas kultural yang begitu besar. Dimana dirombaknya struktur pemerintahan di Indonesia dari satu rezim ke rezim yang lainnya, akan terlihat pengaruhnya terhadap pengamalan Pancasila. Hal ini bagi penulis tidak terlepas dari kondisi sosial politik yang fluktuatif dan berimbas pada pemaknaan masyarakat terhadap Pancasila.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Dengan ini penulis mengemukakan pertanyaan riset tentang kajian Pancasila yaitu, apakah pergantian rezim pemerintahan di Indonesia berpengaruh terhadap penerapan pengamalan Pancasila dan pemaknaannya bagi masyarakat Indonesia dan sejauh apa perbedaan penghayatan masyarakat Indonesia terhadap Pancasila di rezim-rezim pemerintahan yang berbeda.

## **C. TUJUAN PENULISAN**

Adapun tujuan penulisan makalah ini adalah sebagai berikut :

- Menyelesaikan tugas akhir perkuliahan Pancasila
- Menyumbangkan gagasan pemikiran penulis sebagai anak bangsa yang memperhatikan Pancasila dan fluktuatifnya kepercayaan masyarakat Indonesia terutama generasi muda Indonesia.

## **D. PENDEKATAN**

Penulis menggunakan pendekatan gabungan, yaitu pendekatan historis dan sosiologis. Pendekatan historis terlihat pada penjabaran penulis tentang kronologi historis Pancasila dari awal dibentuk hingga kini. Sedangkan pendekatan sosiologis terlihat pada penjabaran penulis tentang tinjauan-tinjauan terhadap pengamalan Pancasila pada masyarakat Indonesia di masa rezim-rezim pemerintahan yang berbeda.

## **BAB II**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Pengamalan Pancasila pada Masa Rezim Demokrasi Terpimpin dibawah Soekarno-Hatta**

Pada masa Orde lama, Pancasila dipahami berdasarkan paradigma yang berkembang pada situasi dunia yang diliputi oleh tajamnya konflik ideologi. Pada saat itu kondisi politik dan keamanan dalam negeri diliputi oleh kekacauan dan kondisi sosial-budaya berada dalam suasana transisional dari masyarakat terjajah (inlander) menjadi masyarakat merdeka. Masa orde lama adalah masa pencarian bentuk implementasi Pancasila terutama dalam sistem kenegaraan. Pancasila diimplementasikan dalam bentuk yang berbeda-beda pada masa orde lama. Terdapat 3 periode implementasi Pancasila yang berbeda, yaitu periode 1945-1950, periode 1950-1959, dan periode 1959-1966.

Pada periode 1945-1950, implementasi Pancasila bukan saja menjadi masalah, tetapi lebih dari itu ada upaya-upaya untuk mengganti Pancasila sebagai dasar negara dengan paham komunis oleh PKI melalui pemberontakan di Madiun tahun 1948 dan oleh DI/TII yang akan mendirikan negara dengan dasar islam. Pada periode ini, nilai persatuan dan kesatuan masih tinggi ketika menghadapi Belanda yang masih ingin mempertahankan penjajahannya di bumi Indonesia. Namun setelah penjajah dapat diusir, persatuan mulai mendapat tantangan. Dalam

kehidupan politik, sila keempat yang mengutamakan musyawarah dan mufakat tidak dapat dilaksanakan, sebab demokrasi yang diterapkan adalah demokrasi parlementer, dimana presiden hanya berfungsi sebagai kepala negara, sedang kepala pemerintahan dipegang oleh Perdana Menteri. Sistem ini menyebabkan tidak adanya stabilitas pemerintahan. Kesimpulannya walaupun konstitusi yang digunakan adalah Pancasila dan UUD 1945 yang presidensiil, namun dalam praktek kenegaraan system presidensiil tak dapat diwujudkan.

Pada periode 1950-1959, walaupun dasar negara tetap Pancasila, tetapi rumusan sila keempat bukan berjiwakan musyawarah mufakat, melainkan suara terbanyak (voting). Sistem pemerintahannya yang liberal sehingga lebih menekankan hak-hak individual. Pada periode ini persatuan dan kesatuan mendapat tantangan yang berat dengan munculnya pemberontakan RMS, PRRI, dan Permesta yang ingin melepaskan diri dari NKRI. Dalam bidang politik, demokrasi berjalan lebih baik dengan terlaksananya pemilu 1955 yang dianggap paling demokratis. Tetapi anggota Konstituante hasil pemilu tidak dapat menyusun UUD seperti yang diharapkan. Hal ini menimbulkan krisis politik, ekonomi, dan keamanan, yang menyebabkan pemerintah mengeluarkan Dekrit Presiden 1959 untuk membubarkan Konstituante, UUD 1950 tidak berlaku, dan kembali kepada UUD 1945. Kesimpulan yang ditarik dari penerapan Pancasila selama periode ini adalah Pancasila diarahkan sebagai ideology liberal yang ternyata tidak menjamin stabilitas pemerintahan.

Pada periode 1956-1965, dikenal sebagai periode demokrasi terpimpin. Demokrasi bukan berada pada kekuasaan rakyat sehingga yang memimpin adalah nilai-nilai Pancasila tetapi berada pada kekuasaan pribadi presiden Soekarno. Terjadilah berbagai penyimpangan penafsiran terhadap Pancasila dalam konstitusi. Akibatnya Soekarno menjadi otoriter, diangkat menjadi presiden seumur hidup, politik konfrontasi, menggabungkan Nasionalis, Agama, dan Komunis, yang ternyata tidak cocok bagi NKRI. Terbukti adanya kemerosotan moral di sebagian masyarakat yang tidak lagi hidup bersendikan nilai-nilai Pancasila, dan berusaha untuk menggantikan Pancasila dengan ideologi lain. Dalam mengimplementasikan Pancasila, Bung Karno melakukan pemahaman Pancasila dengan paradigma yang disebut USDEK. Untuk memberi arah perjalanan bangsa, beliau menekankan pentingnya memegang teguh UUD 45, sosialisme ala Indonesia, demokrasi terpimpin, ekonomi terpimpin dan kepribadian nasional. Hasilnya terjadi kudeta PKI dan kondisi ekonomi yang memprihatinkan. Walaupun posisi Indonesia tetap dihormati di dunia internasional dan integritas wilayah serta semangat kebangsaan dapat ditegakkan. Kesimpulan yang ditarik adalah Pancasila telah diarahkan sebagai ideology otoriter, konfrontatif dan tidak memberi ruang pada demokrasi bagi rakyat.

## **B. Pengamalan Pancasila Pada Masa Rezim Orde Baru dibawah Soeharto**

Orde baru berkehendak ingin melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen sebagai kritik terhadap orde lama yang telah menyimpang dari Pancasila. Situasi internasional kala itu masih diliputi konflik perang dingin. Situasi politik dan keamanan dalam negeri kacau dan ekonomi hampir bangkrut. Indonesia dihadapkan pada pilihan yang sulit, memberikan sandang dan pangan kepada rakyat atau mengedepankan kepentingan strategi dan politik di arena internasional seperti yang dilakukan oleh Soekarno.

Dilihat dari konteks zaman, upaya Soeharto tentang Pancasila, diliputi oleh paradigma yang esensinya adalah bagaimana menegakkan stabilitas guna mendukung rehabilitasi dan pembangunan ekonomi. Istilah terkenal pada saat itu adalah stabilitas politik yang dinamis diikuti dengan trilogi pembangunan. Perincian pemahaman Pancasila itu sebagaimana yang kita lihat dalam konsep P4 dengan esensi selaras, serasi dan seimbang. Soeharto melakukan ijtihad politik dengan melakukan pemahaman Pancasila melalui apa yang disebut dengan P4 (Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila) atau Ekaprasetia Pancakarsa. Itu tentu saja didasarkan pada pengalaman era sebelumnya dan situasi baru yang dihadapi bangsa.

Pada awalnya memang memberi angin segar dalam pengamalan Pancasila, namun beberapa tahun kemudian kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan ternyata tidak sesuai dengan jiwa Pancasila. Walaupun terjadi peningkatan kesejahteraan rakyat dan penghormatan dari dunia

internasional, Tapi kondisi politik dan keamanan dalam negeri tetap rentan, karena pemerintahan sentralistik dan otoritarian. Pancasila ditafsirkan sesuai kepentingan kekuasaan pemerintah dan tertutup bagi tafsiran lain. Demokratisasi akhirnya tidak berjalan, dan pelanggaran HAM terjadi dimana-mana yang dilakukan oleh aparat pemerintah atau negara. Pancasila seringkali digunakan sebagai legitimator tindakan yang menyimpang. Ia dikeramatkan sebagai alasan untuk stabilitas nasional daripada sebagai ideologi yang memberikan ruang kebebasan untuk berkreasi. Kesimpulan, Pancasila selama Orde Baru diarahkan menjadi ideologi yang hanya menguntungkan satu golongan, yaitu loyalitas tunggal pada pemerintah dan demi persatuan dan kesatuan hak-hak demokrasi dikekang.

### **C. Pengamalan Pancasila Pasca Orde Baru hingga kini**

Seperti juga Orde Baru yang muncul dari koreksi terhadap Orde Lama, kini Orde Reformasi, jika boleh dikatakan demikian, merupakan orde yang juga berupaya mengoreksi penyelewengan yang dilakukan oleh Orde Baru. Hak-hak rakyat mulai dikembangkan dalam tataran elit maupun dalam tataran rakyat bawah. Rakyat bebas untuk berserikat dan berkumpul dengan mendirikan partai politik, LSM, dan lain-lain. Penegakan hukum sudah mulai lebih baik daripada masa Orba. Namun, sangat disayangkan para elit politik yang mengendalikan pemerintahan dan kebijakan kurang konsisten dalam penegakan hukum. Dalam bidang sosial budaya, disatu sisi kebebasan berbicara, bersikap, dan bertindak amat memacu kreativitas masyarakat. Namun, di sisi lain justru menimbulkan semangat primordialisme. Benturan antar suku, antar umat beragama, antar kelompok, dan antar daerah terjadi dimana-mana. Kriminalitas meningkat dan pengerahan masa menjadi cara untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang berpotensi tindakan kekerasan.

Kondisi nyata saat ini yang dihadapi adalah munculnya ego kedaerahan dan primordialisme sempit, munculnya indikasi tersebut sebagai salah satu gambaran menurunnya pemahaman tentang Pancasila sebagai suatu ideologi, dasar filsafati negara, azas, paham negara. Padahal seperti diketahui Pancasila sebagai sistem yang terdiri dari lima sila (sikap/prinsip/pandangan hidup) dan merupakan suatu keutuhan yang saling menjiwai dan dijiwai itu digali dari kepribadian bangsa Indonesia yang majemuk bermacam etnis/suku bangsa, agama dan budaya yang

bersumpah menjadi satu bangsa, satu tanah air dan satu bahasa persatuan, sesuai dengan sesanti Bhineka Tunggal Ika.

Menurunnya rasa persatuan dan kesatuan diantara sesama warga bangsa saat ini adalah yang ditandai dengan adanya konflik di beberapa daerah, baik konflik horizontal maupun konflik vertikal, seperti halnya yang masih terjadi di Papua, Maluku. Berbagai konflik yang terjadi dan telah banyak menelan korban jiwa antar sesama warga bangsa dalam kehidupan masyarakat, seolah-olah wawasan kebangsaan yang dilandasi oleh nilai-nilai Pancasila yang lebih mengutamakan kerukunan telah hilang dari kehidupan masyarakat Indonesia.

Orde Reformasi yang baru berjalan beberapa tahun telah memiliki empat Presiden. Pergantian presiden sebelum waktunya karena berbagai masalah. Pada era Habibie, Abdurrahman Wahid, dan Megawati Soekarno Putri, Pancasila secara formal tetap dianggap sebagai dasar dan ideologi negara, tapi hanya sebatas pada retorika pernyataan politik. Ditambah lagi arus globalisasi dan arus demokratisasi sedemikian kerasnya, sehingga aktivis-aktivis prodemokrasi tidak tertarik merespons ajakan dari siapapun yang berusaha mengutamakan pentingnya Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara.

Ideologi negara yang seharusnya menjadi acuan dan landasan seluruh elemen bangsa Indonesia khususnya para negarawan dan para politisi serta pelaku ekonomi dalam berpartisipasi membangun negara, justru menjadi kabur dan terpinggirkan. Hasilnya NKRI mendapat tantangan yang berat.

Timor-Timur yang telah lama bergabung dalam NKRI melalui perjuangan dan pengorbanan lepas dengan sekejap pada masa reformasi tersebut. Daerah-daerah lain juga mengancam akan berdiri sendiri bila tuntutan mereka tidak dipenuhi oleh pemerintah pusat. Tidak segan-segan, sebagian masyarakat menerima aliran dana asing dan rela mengorbankan kepentingan bangsanya sebagai imbalan dolar.

Dalam bahasa intelijen kita mengalami apa yang dikenal dengan "subversi asing", yakni kita saling menghancurkan negara sendiri karena campur tangan secara halus pihak asing. Di dalam pendidikan formal, Pancasila tidak lagi diajarkan sebagai pelajaran wajib sehingga nilai-nilai Pancasila pada masyarakat melemah.

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Dari yang telah dijabarkan penulis diatas, dapat ditarik benang merah yaitu, sebagai berikut :

- Terlihat bahwa dari tinjauan-tinjauan dan fakta-fakta historis yang telah penulis jabarkan diatas, pengamalan Pancasila pada masyarakat Indonesia sangat dipengaruhi oleh pergantian rezim pemerintahan yang berkuasa di Indonesia. Hal tersebut dibuktikan melalui perbedaan-perbedaan kebijakan politis masing-masing rezim pemerintahan, yang kemudian dapat secara signifikan mengubah cara pandang dan interpretasi masyarakat terhadap Pancasila sebagai dasar negara.
- Karena pergantian rezim pemerintahan adalah hal yang sangat berpengaruh pada pengamalan Pancasila maka tidak dapat dipungkiri bahwa interpretasi makna masing-masing generasi masyarakat Indonesia dapat berbeda terhadap Pancasila sendiri. Hal ini dikarenakan pemikiran yang tidak statis namun dinamis.

## **B. SARAN**

Ekspektasi penulis ke depan agar Pancasila dapat dimaknai sebagai sarana pemersatu di Indonesia yang kaya akan diversitas kultural dan keberagaman ini. Penulis memaknai Pancasila tidak memiliki makna yang tunggal namun jamak, dan siapapun yang memaknai dirinya sebagai orang Indonesia sejati memiliki kebebasan penuh untuk memaknai Pancasila sesuai dengan jati dirinya. Selama radikalisme yang dianutnya tidak mengganggu eksistensi yang lain. Penulis percaya bahwa dengan memaknai Pancasila sebagai ideologi yang mendukung pluralisme, maka Pancasila akan dapat dimaknai oleh setiap generasi.

## REFERENSI

### **Makalah:**

A.T. Soegito, 1997,

Pokok-pokok materi: Sejarah Perjuangan Bangsa Indonesia, Semarang.

-----, 1998,

Sejarah Indonesia Kontemporer sebagai Materi Pendidikan Pancasila (Analisis Berbagai Permasalahannya), Bogor: Ditbinsarak Ditjen Dikti Depdikbud.

-----, 2000,

Sejarah Perjuangan Bangsa Indonesia sebagai Titik Tolak Memahami Asal Mula Pancasila, Jakarta: Ditjen Dikti Depdiknas.

### **Buku :**

Luhulima, James, 2001,

Hari-hari Terpanjang Menjelang Mundurnya Presiden Soeharto: dan Beberapa Peristiwa Terkait, Jakarta: Kompas.